SEUNEUBOK LADA

Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan

Vol. 12 No. 1 (2025): 101-115, DOI. 10.33059/jsnbl.v12i1.11750

ISSN:2356-0770 ; E-ISSN:2685-2705

ASPEK HISTORIS DAN SOSIAL-EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN BENDUNGAN AIR GEGAS PADA MASYARAKAT SUKAKARYA TAHUN 1987-1990

Kamil, Sarkowi, Yadri Irwansyah

Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Silampari, Indonesia

kamilarray@gmail.com, sarkowisulaiman@gmail.com, yadriirwansyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak historis dan sosial-ekonomi pembangunan Bendungan Air Gegas di Kecamatan Sukakarya pada rentang tahun 1987 hingga 1990. Bendungan ini merupakan bagian dari kebijakan pembangunan Orde Baru yang menekankan swasembada pangan dan redistribusi penduduk melalui program transmigrasi. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto secara sistematis menjalankan pembangunan infrastruktur irigasi sebagai fondasi ketahanan pangan nasional dan mengarahkan perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa guna memeratakan beban demografis dan membuka lahan-lahan pertanian baru. Kebijakan ini dilandasi oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 tentang Keproyekan Transmigrasi dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan Produksi Pangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan bendungan ini dilatarbelakangi program swasembada pangan nasional dan dibarengi dengan transmigrasi. Meskipun dirancang untuk mendukung sektor pertanian lokal, realisasinya tidak berjalan sesuai rencana. Kerusakan pada pintu air dan kurangnya pemeliharaan menyebabkan sistem irigasi tidak berfungsi optimal, sehingga dampaknya terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat tidak signifikan. Akibatnya, terjadi pergeseran pola mata pencaharian dan perubahan sosial di masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat lokal.

Kata Kunci: Bendungan Air Gegas, sejarah lokal, irigasi, Orde Baru, sosial ekonomi

ABSTRACT

This study examines the historical and socio-economic impacts of the construction of the Air Gegas Dam in Sukakarya District during the period of 1987 to 1990. The dam was part of the Orde Baru government's development policy, which emphasized food self-sufficiency and population redistribution through the transmigration program. Under President Suharto, the Orde Baru administration systematically implemented irrigation infrastructure development as a foundation for national food security and directed the migration of people from Java to outer islands in order to balance demographic pressures and open new agricultural lands. This policy was supported by Law No. 9 of 1975 concerning Transmigration Projects and Presidential Instruction

No. 3 of 1986 concerning the Increase of Food Production. The study employed a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the construction of the dam was driven by the national food self-sufficiency program alongside transmigration. Although it was designed to support the local agricultural sector, its implementation did not go as planned. Damage to the water gates and lack of maintenance rendered the irrigation system ineffective, resulting in minimal impact on agricultural productivity and community welfare. Consequently, shifts in livelihoods and social changes occurred among the local population. This research underscores the importance of sustainable infrastructure management that is responsive to the social dynamics of local communities.

Keywords: *Air Gegas Dam, local history, irrigation, Orde Baru, socio-economic.*

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu global yang terus menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan, banyak negara berkembang termasuk Indonesia, menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian dan pilar utama stabilitas sosial. Perkembangan irigasi di Indonesia dalam menuju sistem irigasi yang maju dan tangguh tak lepas dari irigasi tradisional yang telah dikembangkan sejak ribuan tahun yang lalu, irigasi maju atau modern dapat saja muncul karena usaha memperbaiki atau keberlanjutan pengembangan tradisi yang telah ada, dan dipengaruhi oleh ciri-ciri geografis setempat serta perkembangan budidaya pertanian (Putri & Sudiarta, 2024). Orde Baru yang dimulai pada pertengahan tahun 1966 di Indonesia memainkan peran yang krusial dalam mengawali dan mendorong transformasi pada sektor pertanian, situasi dan keadaan ketersediaan pangan Indonesia pada masa Orde Lama sangat memprihatinkan karena tidak adanya pembangunan dalam bidang pengairan yang berarti (Andrianto, 2023). Sejak awal pemerintahan Orde Baru tahun 1966, Indonesia secara sistematis menjalankan kebijakan swasembada pangan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Untuk pembangunan irigasi di luar pulau Jawa sering dibarengi dengan program transmigrasi guna penyebaran dan pemerataan penduduk agar tidak terpusat di pulau Jawa dan akan menjadi tenaga petani penggarap diluar Jawa yang kurang penduduknya (Purwanto, 2019). Dalam rangka menunjang program swasembada pangan tersebut, pembangunan sistem irigasi modern dilaksanakan secara besar-besaran melalui proyek-

proyek strategis nasional, terutama pada wilayah-wilayah transmigrasi di luar Pulau Jawa. Salah satu provinsi yang menjadi lokasi prioritas adalah Sumatera Selatan, yang memiliki sumber daya air melimpah dan luas lahan pertanian potensial. Salah satu tempat pertama kali dijadikan sebagai daerah transmigrasi adalah di pulau Sumatera antara lain di daerah Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan yang cukup luas serta banyak terdapat sungai besar (Purnamasari, 2021).

Kabupaten Musi Rawas berpotensi besar untuk mengembangkan lahan sawah yang nantinya dapat digunakan sebagai lahan pertanian terutama dalam kaitannya dengan pelestarian swasembada pangan, peningkatan dan proses pengecekan produksi dengan benar, peningkatan pendapatan dan lapangan kerja masyarakat, serta pengembangan agrobisnis dan wilayah (Andrianto, 2023). lokasi pembangunan Bendungan Air Gegas ini tidak lepas dari dinamika politik dan sosial masa lalu. Kecamatan Sukakarya yang menjadi wilayah utama dampak proyek, sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Jayaloka yang berakar dari proyek transmigrasi militer era Presiden Soekarno, yaitu Proyek Kungku tahun 1956. Wilayah ini dihuni oleh eks anggota Corps Tjadangan Nasional (CTN) dan keluarganya, yang kemudian berkembang menjadi komunitas agraris dengan dominasi kegiatan pertanian dan perkebunan. Potensi agraris inilah yang mendorong pemerintah Orde Baru menjadikan wilayah ini sebagai lokasi pembangunan infrastruktur irigasi skala besar (Sujudi, 1956; Arsip Desa Sukakarya, 2007). Menurut informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Mujimat, salah satu pelaku sejarah yang terlibat dalam proyek tersebut, sebelum pembangunan bendungan, masyarakat di sekitar wilayah ini menggantungkan pertanian mereka pada sistem pengairan yang masih bersifat tradisional, bahkan di beberapa lokasi tidak terdapat saluran irigasi sama sekali. Hal ini menyebabkan hasil panen tidak maksimal, bahkan kerap gagal saat musim kemarau (Mujimat, 2025).

Meskipun Bendungan Air Gegas dirancang untuk mengairi lebih dari 3.800 hektare sawah, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Hanya beberapa tahun setelah dioperasikan, bendungan mengalami berbagai permasalahan teknis seperti kerusakan pintu air dan distribusi air yang tidak merata. Hal ini mengakibatkan gagalnya irigasi pada sejumlah lahan pertanian, yang kemudian berdampak pada menurunnya hasil panen dan beralihnya sebagian besar masyarakat dari petani padi

menjadi pekebun karet atau buruh harian. Kegagalan fungsi infrastruktur ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memicu perubahan sosial di tingkat komunitas, seperti meningkatnya kesenjangan ekonomi, pergeseran mata pencaharian, dan menurunnya semangat gotong royong masyarakat (Wawancara Mujimat, 2025). Masalah yang muncul dari kasus Bendungan Air Gegas mencerminkan lemahnya keberlanjutan proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pusat namun tidak sepenuhnya memperhatikan dinamika dan kapasitas lokal. Selain itu, proyek ini juga menunjukkan bagaimana proyek pembangunan yang secara fisik selesai dikerjakan belum tentu mencapai keberhasilan secara fungsional dan sosial. Padahal, keberhasilan pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari penyelesaian konstruksi, tetapi juga dari sejauh mana infrastruktur tersebut mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian terhadap aspek historis dan sosial ekonomi pembangunan Bendungan Air Gegas menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan merekonstruksi sejarah pembangunan infrastruktur era Orde Baru di tingkat lokal, tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan nasional berinteraksi dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat desa. Selain itu, kajian ini juga diharapkan mampu memberikan pelajaran penting bagi praktik pembangunan ke depan, terutama dalam merancang kebijakan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan memiliki skema pemeliharaan yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses awal pembangunan Bendungan Air Gegas di Kecamatan Sukakarya serta menganalisis dampak sosial-ekonomi yang muncul di masyarakat akibat implementasi proyek tersebut pada kurun waktu 1987 hingga 1990. Dengan pendekatan historis dan deskriptif-kualitatif, studi ini berupaya memberikan kontribusi pada literatur sejarah pembangunan lokal dan evaluasi kebijakan pembangunan pertanian era Orde Baru di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam

(Jaya, 2020:6). Metode dan Pendekatan ini dipilih karena untuk merekonntruksi sejarah pembangunan Bendungan Air Gegas dan memhami dampak sosial-ekonominya melalui perspektif masyarakat lokal. Fokus utama penelitian diarahkan pada upaya rekonstruksi fakta sejarah serta pemahaman terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat akibat pembangunan tersebut.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposif, yakni di wilayah yang teraliri oleh sistem irigasi dari Bendungan Air Gegas, antara lain Desa Sugihwaras, Sukowarno, Yudha Karya Bhakti, dan Bangun Rejo. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan keterkaitan langsung masyarakat setempat dengan keberadaan bendungan sebagai bagian dari struktur ekonomi dan sosial lokal. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat yang mengalami langsung proses pembangunan bendungan, termasuk tokoh lokal seperti Mujimat yang terlibat dalam pengelolaan bendungan pada masa awal operasionalnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- Observasi

  Penelitian dilakukan dengan observasi non-partisipatif**,** artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan bertindak sebagai pengamat pasif. Fokus observasi diarahkan pada (1). kondisi fisik bendungan, sistem irigasi, (2) aktivitas pertanian masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana infrastruktur yang dibangun masih berfungsi dan digunakan oleh masyarakat.

- Wawancara

  Dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang relevan, seperti tokoh masyarakat, petani, dan pelaku sejarah pembangunan bendungan. Wawancara ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan reflektif dari narasumber, sekaligus membuka ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pandangan subjektif mereka.

- Dokumentasi

  Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan sejarah pembangunan bendungan dan kondisi sosial

masyarakat. Sumber dokumentasi meliputi arsip desa, dokumen proyek pembangunan dari Dinas PU Kabupaten Musi Rawas, laporan Statistik BPS Kabupaten Musi Rawas (1985-1990), serta literatur terkait transmigrasi dan kebijakan pembangunan era Orde Baru. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap dan pembanding data hasil observasi dan wawancara, guna memperkuat validitas temuan.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan visual untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola temuan di lapangan. Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai latar belakang, proses, dan dampak dari pembangunan Bendungan Air Gegas, tidak hanya dari sudut pandang historis, tetapi juga dari realitas sosial ekonomi masyarakat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kecamatan Sukakarya

Kecamatan Sukakarya adalah Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Jayaloka. Menurut Sutoyo (Tetua Adat Kecamatan Sukakarya), Jayaloka diberinama langsung oleh presiden Soekrano, Jayaloka berasal dari kata *"Djaya"* artinya makmur dan sejahtera, "*Loka"* artinya tempat. Soekarno melalui pidatonya di depan anggota C.T.N. saat peresmian Proyek Kungku, ia berharap "dengan adanya nama Djayaloka, daerah yang sekarang masih rimba ini dengan semangat patriotisme anak-anakku bekas tentara bisa di taklukan menjadi daerah yang makmur, sejahtera, bukan saja untuk kamu dan keluaramu, melainkan juga untuk bangsamu" (Sujudi, A. 1956:67).

Pada tahun 1955 wilayah Jayaloka adalah hutan Kungku yang luasanya mencapai 110.000 HA, hutan ini ini sangat lebat dan belum sama sekali di huni oleh manusia. Proyek Kungku adalah Transmigrasi Angkatan Darat (AD) yang berasal dari Corp Tjadangan Tentara Nasional (CTN), dan di resmikan oleh presiden Soekarano,

proyek ini menghabiskan dana sebesar Rp.98.000.000. Sujudi, A. (1956:69). Tujuan dari transmigrasi kungku adalah sebagai usaha untuk mengembalikan bekas anggota tentara kedalam masyarakat. Transmigrasi kungku ini di tunjukan untuk kompi-kompi transmigrasi C.T.N (Corp Tjadangan Nasional) yang berasal dari CTN Teritorium III Djawa Barat, Teritorium IV Djawa Tengah, dan Teritorium V Djawa Timur. Tiap-tiap Transmigrasi akan di beri tanah secara Cuma-Cuma seluas 3 HA. Proyek Kungku ini di kerjakan oleh Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara (BPBAT) yang dikeplai Oleh Kementrian Pertahanan Kolonel Soehoed Prawiroatmodjo (Sujud, A. 1956).

Setelah persemian selesai dilaksanakan di Simpang Lubuk Besar (Sekarang) di waktu yang sama, Kolonel Seohoed bersama anggota C.T.N melakukan ekpedisi ke hutan kungku, ekpedisi ini dilakukan untuk melihat para tentara dari BPBAT yang sedang membuka lahan untuk perumahan dan perkebunan. Ada sekitar 80.000 HA tanah yang bisa di tanami atau dihuni, selama pembukaan Hutan Kunggu membutuhkan waktu sekitar 4 tahun dan rencana tanah yang di buka mencapai 20.000 HA. Pada proses pembukaan lahan tersebut, para Biro pertahanan menggunakan alat-alat berat untuk menebang pohon-pohon besar, pembuatan jalan, pentupan rawa-rawa, serta ekpoitasi kayu dan pengangkutan barang-barang berat (Sujudi, A. 1956)..

Setelah peresmian tersebut, pada 26 april 1956, panglima Teritorial II Sriwijaya menyerahkan pembinaan Jayaloka kepada pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas dan menjadikannya perwakilan pemerintah daerah, Proyek kungku terbagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah Ngestiboga dan Sukakarya. Pada bulan november tahun 1964 diadakan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk wilayah Ngestiboga dan Sukakarya, untuk setiap kelompok Eks Pejuang 45di jadikan satu desa dan masing masing-masing desa di isi 80 kepala keluarga. Di wilayah Sukakarya terdapat empat desa yang melakukan pemilihan kepala desa, antara lain desa Sugihwaras, Sukowarno, Bangun Rejo, dan Ciptodadi. Kemudian di wilayah Sukakarya terbentuklah koordinator kepala desa, koordinator ini bertugas untuk mengkoordinir 4 desa yang termasuk di wilayah Sukakarya (Arsip Desa Sukakarya 2007).

Pada tahun 1965 terbentuklah Kecamatan Jayaloka. Kecamatan ini merupakan kecamatan termewah di Kabupaten Musi Rawas bahkan Lahat dan Muara Enim, hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitas infrastrukturnya dan penerangan listrik, serta fasilitas lainnya. (Arsip Desa Sukakarya 2007). Namun, kemajuan dan kemewahan yang pernah

melekat pada Kecamatan Jayaloka tidak dapat bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, berbagai faktor internal maupun eksternal menyebabkan kemunduran pembangunan di wilayah ini. Salah satu penyebab utama adalah ketimpangan dalam distribusi pembangunan antar wilayah desa yang berada dalam naungan Kecamatan Jayaloka (Arsip Desa Sukakarya 2007). Ketimpangan tersebut dirasakan sangat nyata oleh masyarakat di wilayah Marga Sukakarya, yaitu daerah yang berada di bagian pinggiran dan cukup jauh dari pusat kecamatan. Wilayah Marga Sukakarya, yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Kecamatan Jayaloka, mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai tidak merata (Arsip desa Sukakarya 2007). Masyarakat di wilayah ini merasa kurang tersentuh oleh perhatian dan pelayanan pemerintah kecamatan. Selain itu, faktor geografis dan jarak yang cukup jauh dari pusat kecamatan juga memperparah keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi dan pembangunan.

Keinginan masyarakat untuk melepaskan diri dari Jayaloka dan membentuk kecamatan tersendiri semakin kuat seiring dengan kesadaran bahwa mereka memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang memadai untuk berkembang secara mandiri. Salah satu potensi yang dimiliki wilayah ini adalah keberadaan perkebunan karet yang telah dikembangkan sejak tahun 1987 melalui proyek nasional PRPT (Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman) dan SRDP (Smallholder Rubber Development Project), yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani karet. Selain sektor perkebunan, wilayah ini juga memiliki potensi sumber daya energi berupa cadangan minyak dan gas bumi, yang berada di bawah pengelolaan PT Pertamina Persero (Arsip desa Sukakarya 2007).

Aspirasi masyarakat akhirnya direspons oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yang kemudian mengesahkan pembentukan Kecamatan Sukakarya pada tanggal 6 Maret 2007. Nama “Sukakarya” diambil dari nama Marga Sukakarya sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah sosial dan kultural masyarakat setempat. Saat pertama kali dibentuk, Kecamatan Sukakarya terdiri dari tujuh desa yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Jayaloka.

Pembentukan Kecamatan Sukakarya bukan hanya merupakan langkah administratif, tetapi juga menjadi simbol perjuangan masyarakat dalam menuntut keadilan pembangunan serta pengakuan atas potensi dan identitas lokal. Dengan status

sebagai kecamatan mandiri, masyarakat berharap dapat memperoleh perhatian yang lebih besar dari pemerintah dan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif untuk kemajuan wilayah mereka.

B. Aspek Historis Pembangunan Bendungan Air Gegas

Pembangunan Bendungan Air Gegas merupakan bagian integral dari program pembangunan infrastruktur era Orde Baru, terutama dalam mendukung swasembada pangan dan penguatan sistem irigasi nasional. Pembangunan ini memiliki dimensi historis yang erat kaitannya dengan dinamika sosial-politik kawasan Musi Rawas, khususnya di wilayah Kecamatan Djayaloka dan Sukakarya. wilayah Kecamatan Djayaloka merupakan kawasan pembukaan hutan yang dijadikan lokasi Proyek Transmigrasi Kungku oleh Presiden Soekarno pada tahun 1956. Proyek ini menampung eks anggota Corps Tjadangan Nasional (CTN) dari Jawa, dengan tujuan sosial-politik untuk merehabilitasi bekas tentara ke dalam masyarakat produktif. Dalam pidato peresmian proyek tersebut, Soekarno menamai kawasan ini "Djayaloka," yang berarti "tempat yang makmur dan sejahtera," sebagai simbol harapan bagi transformasi sosial-ekonomi kawasan tersebut (Sujudi, A. 1956:67).

Pembukaan hutan Kungku di Djayaloka dilakukan dengan sistematis, mencakup eksploitasi kayu, pembuatan jalan, pembukaan rawa, dan perumahan transmigran. Pada tahun 1965, Djayaloka telah berkembang menjadi kecamatan yang representatif dengan infrastruktur dasar seperti listrik, jalan, dan fasilitas pendidikan. Namun, seiring waktu, distribusi pembangunan yang tidak merata menyebabkan munculnya tuntutan pemekaran wilayah. Wilayah Marga Sukakarya, yang berada di bagian pinggiran Djayaloka, merasa terpinggirkan dan akhirnya membentuk Kecamatan Sukakarya pada tahun 2007 (Arsip Kecamata Sukakarya, 2007). Wilayah inilah yang kemudian menjadi lokasi pembangunan Bendungan Air Gegas.

Pembangunan Bendungan Air Gegas sendiri dimulai sejak tahun 1978, melalui proyek nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Proses pembangunan dilakukan dalam beberapa tahap besar. Tahap pertama adalah pembangunan mercu atau bendungan utama, yang membendung Sungai Gegas di Desa Sugihwaras, menyebabkan genangan air seluas 500 hektar (Dinas PU Cipta Karya, 2025). Tahap berikutnya adalah pembangunan tiga buah pintu air yang berfungsi untuk

mengatur aliran debit air ke saluran irigasi. Kemudian dibangun tanggul banjir sebagai pengendali limpasan air hujan, dan terakhir dibangun jaringan irigasi sekunder yang dirancang untuk mengaliri area pertanian di Desa Sugihwaras, Bangun Rejo, Sukowarno, dan Yudha Karya Bhakti. Proyek ini melibatkan sekitar 200 tenaga kerja lokal, sebagian besar berasal dari desa-desa sekitar. Pembangunan fisik selesai pada tahun 1986 dan diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum(Dinas PU Cipta Karya, 2025). Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar dan diharapkan menjadi penopang irigasi utama kawasan pertanian Musi Rawas bagian barat. Namun, harapan tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Menurut penuturan Bapak Mujimat, selaku pengelola bendungan sejak awal, kerusakan pada sistem pintu air menjadi faktor utama kegagalan distribusi air ke jaringan irigasi. Akibatnya, setelah tahun 1990, bendungan tersebut tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya dan masyarakat kembali bergantung pada pola tanam tadah hujan (Mujimat, 2025).

Pembangunan Bendungan Air Gegas merupakan bentuk rekonstruksi masa lalu sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo bahwa sejarah bukan hanya narasi peristiwa, tetapi penafsiran atas fakta untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Moh. Hatta juga menyatakan bahwa sejarah harus menyelidiki perkembangan peristiwa yang berdampak dalam kehidupan masyarakat (Iskandar dalam Hariyono, 2018). Pembangunan ini tidak hanya mengandung nilai infrastruktur semata, tetapi juga menjadi refleksi dari peran negara dalam membentuk kehidupan masyarakat melalui kontrol terhadap alam.

Sartono Kartodirdjo menekankan bahwa sejarah harus dipahami sebagai hasil interaksi antara struktur dan manusia. Dalam kasus ini, struktur negara Orde Baru membentuk sistem pertanian melalui proyek pembangunan besar, tetapi interaksi manusia sebagai subjek sosial tidak selalu sesuai dengan rencana pusat. Terbukti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak disertai dengan kesinambungan pengelolaan, menyebabkan proyek tersebut mengalami kegagalan fungsi sejak awal operasionalnya.Kecamatan Djayaloka dan Sukakarya sebagai latar tempat pembangunan memiliki makna penting dalam sejarah lokal Musi Rawas. Sebagai wilayah yang dibentuk dari perjuangan kolektif transmigran, daerah ini menunjukkan bagaimana struktur sosial dan ruang geografis dibentuk oleh kekuatan politik nasional. Bendungan Air Gegas menjadi simbol fisik dari semangat pembangunan Orde Baru, namun juga

menjadi saksi bisu atas lemahnya aspek perawatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya.

Dengan demikian, pembangunan Bendungan Air Gegas pada periode 1978–1987 tidak dapat dipahami hanya sebagai proyek teknis semata, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari dinamika historis yang melibatkan kebijakan pusat, aspirasi lokal, dan transformasi ruang sosial di Kecamatan Sukakarya yang sebelumnya merupakan bagian dari Djayaloka. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi dari keberlanjutan fungsi dan dampaknya terhadap masyarakat.

C. Dampak Sosial-ekonomi pembangunan Bendungan Air Gegas terhadap Masyarakat Sukakarya tahun 1987-1990

Setelah peresmian Bendungan Air Gegas pada tahun 1987, harapan masyarakat Kecamatan Sukakarya terhadap peningkatan produktivitas pertanian sempat menguat. Bendungan ini dirancang untuk mengaliri 3.845 hektare sawah dengan irigasi modern, sehingga masyarakat optimis dapat meningkatkan hasil panen, khususnya padi. Namun, hanya dalam kurun waktu satu tahun setelah dioperasikan, berbagai masalah mulai muncul. Salah satu yang paling berdampak adalah kerusakan pada tanggul bendungan yang terjadi pada musim kemarau 1987, menyebabkan banyak sawah mengalami kekeringan dan gagal panen. Menurut Mujimat, pengelola Bendungan Air Gegas saat itu, sistem irigasi tidak berjalan maksimal karena debit air tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh jaringan sepanjang 35 km, terutama desa-desa yang berada di ujung saluran seperti Banpres dan Dharma Sakti. Hal ini diperparah dengan lambatnya respon pemerintah dalam memperbaiki kerusakan, meskipun laporan telah disampaikan sejak awal kejadian.

Situasi tersebut menjadi titik balik perubahan pola pertanian masyarakat. Sejak tahun 1987, banyak petani mulai beralih dari sawah ke kebun karet. Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama: pertama, tanaman karet tidak membutuhkan banyak air, sehingga lebih tahan terhadap kekeringan; kedua, pada saat yang sama pemerintah menggulirkan program PRPT (Perluasan dan Rehabilitasi Perkebunan Tanaman), yang menyediakan bibit dan pupuk karet secara kredit bagi petani. Berdasarkan keterangan dari Sutoyo (2025), peralihan ini dianggap masyarakat lebih menjanjikan secara

ekonomi. Namun kenyataannya, harga karet yang fluktuatif membuat pendapatan petani menjadi tidak stabil, dan bahkan lebih rendah dibandingkan saat menanam padi. Tidak semua masyarakat langsung menanam karet secara tunggal. Menurut keterangan Kepala Desa Sugihwaras, Muhammad Tohir, selama pohon karet masih dalam masa pertumbuhan (sekitar 5–6 tahun), masyarakat menggunakan sistem pertanian campuran. Mereka menanami lahan dengan sayur-sayuran cepat panen seperti kangkung, cabai, dan kacang-kacangan. Strategi ini dilakukan untuk menghindari lahan kosong sekaligus menambah penghasilan harian mereka sembari menunggu pohon karet bisa disadap.

"Biasanya kalau buka kebun karet, warga juga nanam sayur-sayuran, cabai, kacang, daripada tanah kosong kan lebih baik sambil panen yang cepat," ujar Muhammad Tohir (Wawancara, 2 Mei 2025). Pola ini menunjukkan kemampuan adaptif masyarakat dalam menghadapi keterbatasan sumber daya air dan ekonomi. Meskipun tanaman karet tidak banyak membutuhkan air, sayur-sayuran tetap membutuhkan pasokan yang stabil, terutama saat musim kemarau. Untuk itu, masyarakat masih menggunakan sebagian air dari bendungan, meskipun tidak melalui saluran irigasi utama, melainkan dengan sistem pengambilan manual dari sisa saluran yang masih berfungsi atau dari kolam-kolam kecil. Perubahan ini turut mencerminkan pergeseran sosial ekonomi di Kecamatan Sukakarya. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pertanian padi mulai mengembangkan pola mata pencaharian baru yang lebih fleksibel. Namun demikian, tidak semua petani mampu mengikuti perubahan ini. Petani kecil yang tidak memiliki modal untuk membuka kebun karet atau membeli bibit sayuran terpaksa menjadi buruh atau mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, sehingga memperluas kesenjangan ekonomi lokal. Di sisi lain, dampak sosial dari pembangunan bendungan sempat menciptakan semangat gotong royong yang kuat. Pada masa konstruksi, masyarakat lokal dilibatkan secara aktif sebagai pekerja proyek, termasuk menggali saluran irigasi dan membangun tanggul banjir. Proyek ini sempat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Namun, ketika infrastruktur mulai rusak dan tidak ditangani secara cepat, semangat kolektif masyarakat menurun, digantikan oleh rasa kecewa dan individualisme ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Bendungan Air Gegas membawa dampak sosial-ekonomi yang rumit dan berlapis. Meskipun awalnya menjanjikan penguatan pertanian padi dan peningkatan kesejahteraan, kegagalan dalam

pengelolaan dan pemeliharaan membuat masyarakat harus melakukan adaptasi secara mandiri melalui konversi lahan, diversifikasi pertanian, dan pergeseran jenis pekerjaan. Transformasi ini menandai fase penting dalam sejarah ekonomi lokal Kecamatan Sukakarya pasca pemisahannya dari Jayaloka.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembangunan Bendungan Air Gegas di Kecamatan Sukakarya serta menganalisis dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan pada masyarakat sekitar pada kurun waktu 1987 hingga 1990. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Proses pembangunan Bendungan Air Gegas dilatarbelakangi oleh kebijakan Orde Baru dalam mendukung program swasembada pangan dan program transmigrasi di luar Pulau Jawa. Kecamatan Sukakarya yang sebelumnya merupakan wilayah transmigrasi eks-Proyek Kungku dipilih karena potensi agraris dan posisinya sebagai bekas kawasan hutan yang sudah dibuka sejak era Presiden Soekarno. Pembangunan bendungan dilaksanakan pada akhir 1970-an hingga diresmikan pada 1987, dengan tujuan utama mengairi ribuan hektare lahan pertanian. Namun demikian, perencanaan yang bersifat top-down, lemahnya sistem distribusi air, serta kurangnya pemeliharaan menyebabkan bendungan gagal menjalankan fungsinya secara maksimal.

Dampak sosial-ekonomi pembangunan bendungan tidak sesuai dengan harapan awal. Masyarakat yang semula menggantungkan hidup pada pertanian padi terpaksa beralih ke sektor perkebunan karet akibat gagal panen dan tidak tersedianya air irigasi secara merata. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pola mata pencaharian dan struktur ekonomi lokal. Di sisi lain, meskipun proyek ini sempat memberikan dampak positif dalam bentuk lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur desa, manfaat tersebut tidak berlangsung lama karena tidak diikuti dengan strategi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Semangat kolektif yang muncul saat proyek berlangsung perlahan memudar ketika infrastruktur mulai rusak dan tidak ditangani secara tepat.

Temuan penelitian ini mempertegas pentingnya memahami pembangunan sebagai proses historis dan sosial, bukan semata-mata sebagai kegiatan teknis. Mengacu

pada pemikiran Kuntowijoyo dan Sartono Kartodirdjo, pembangunan Bendungan Air Gegas adalah representasi dari interaksi antara struktur negara dan masyarakat lokal, yang memperlihatkan ketimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat terhadap konteks sosial setempat. Secara teori, hasil penelitian ini mendorong pentingnya penerapan pendekatan partisipatif dan kontekstual dalam pembangunan infrastruktur, agar proyek tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga mampu menopang kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, keterbatasan sumber data historis dan dokumentasi tertulis menjadi kendala utama dalam merekonstruksi proses pembangunan Bendungan Air Gegas secara lebih rinci. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang mengalami langsung peristiwa tersebut, sehingga terdapat potensi subjektivitas dan keterbatasan ingatan dari informan. Kedua, penelitian ini berfokus pada empat desa yang secara langsung terdampak oleh pembangunan bendungan, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh dampak bendungan terhadap wilayah yang lebih luas dalam lingkup Kecamatan Sukakarya atau bahkan Kabupaten Musi Rawas. Ketiga, penelitian ini tidak mengukur secara kuantitatif perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih bersifat kualitatif-deskriptif dan interpretatif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih luas baik secara geografis maupun metodologis. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur secara lebih objektif dampak sosial-ekonomi pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat, seperti melalui survei tingkat pendapatan, pola konsumsi, dan indeks kesejahteraan. Selain itu, penting juga untuk melakukan kajian komparatif dengan wilayah lain yang mengalami pembangunan irigasi serupa pada masa Orde Baru, agar dapat ditemukan pola-pola umum dan faktor keberhasilan atau kegagalan proyek pembangunan infrastruktur. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggali lebih dalam peran kelembagaan lokal, partisipasi masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah pasca-Orde Baru dalam menjaga keberlanjutan fungsi bendungan sebagai sumber daya publik.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Djoko Utomo, Siti Nurul Aida, Taufiq Hidayah. 2020. Optimalisasi Pengelolaan

Perikanan di Danau Gegas Kabupaten Musi Rawas. Jurnal Kebijakan perikanan Indnesia.

Agus Sujudi. (1956). *Djajaloka,* Arsip Kementrian Pertahanan Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara (B.P.A.T)

Andrianto, A. D. (2023). Transformasi Pertanian Masa Orde Baru dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, *11*(2), 14–20.

Arsip Desa Sukakarya. (2007). *Dokumen Administratif Pembentukan Kecamatan Sukakarya*. Sukakarya: Pemerintah Desa Sukakarya.

Barokah, U., Nugroho, R. J., Huda, M., & Daenuri. (2021). Pengenalan Varietas Unggul Baru Padi Sawah Berbasis Penerapan Teknologi Terpadu Di Desa Seling, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. *Jurnal Pengabdian Nasional*, *2*(2), 74–84.

Data Teknis Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas, tahun 2015.

Iskandar, T. (1996). *Konsep Sejarah*. 1–167.

Purwanto, P. (2019). Strategi dan Bentuk-bentuk Informasi Transmigrasi pada Masa Orde Baru dalam Rangka Mensukseskan Program Pembangunan Nasional. *Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca*, *35*(2), 1–15.

Purnamasari, D. (2021). *Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran Desa Perintis Di Rimbo Bujang (1975 – 2020)*. *3*(3), 54–64.

Putri, P. I. D., & Sudiarta, I. K. (2024). Modernisasi Irigasi: Upaya Perluasan Akses Terhadap Teknologi Informasi dalam Mendukung Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. *Abdimas Galuh*, *6*(1), 348. https://doi.org/10.25157/ag.v6i1.12975

Rama, D., & Semarang, U. N. (2023). *Kebijakan Pertanian Soeharto Masa Orde Baru : Upaya Menyokong Kebijakan Pertanian Soeharto Masa Orde Baru : Upaya Menyokong Progesivitas Para Petani Dalam Negeri*. *November*, 0–10.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Wawancara dengan Mujimat (Pengelola Bendungan), 24 Februari 2025.